



Mendorong Keterbukaan Pemerintah dalam Perspektif Partisipasi Masyarakat

OGI GOES to CAMPUS

Asima Siahaan, PhD

Dosen FISIP Universitas Sumatera
Utara

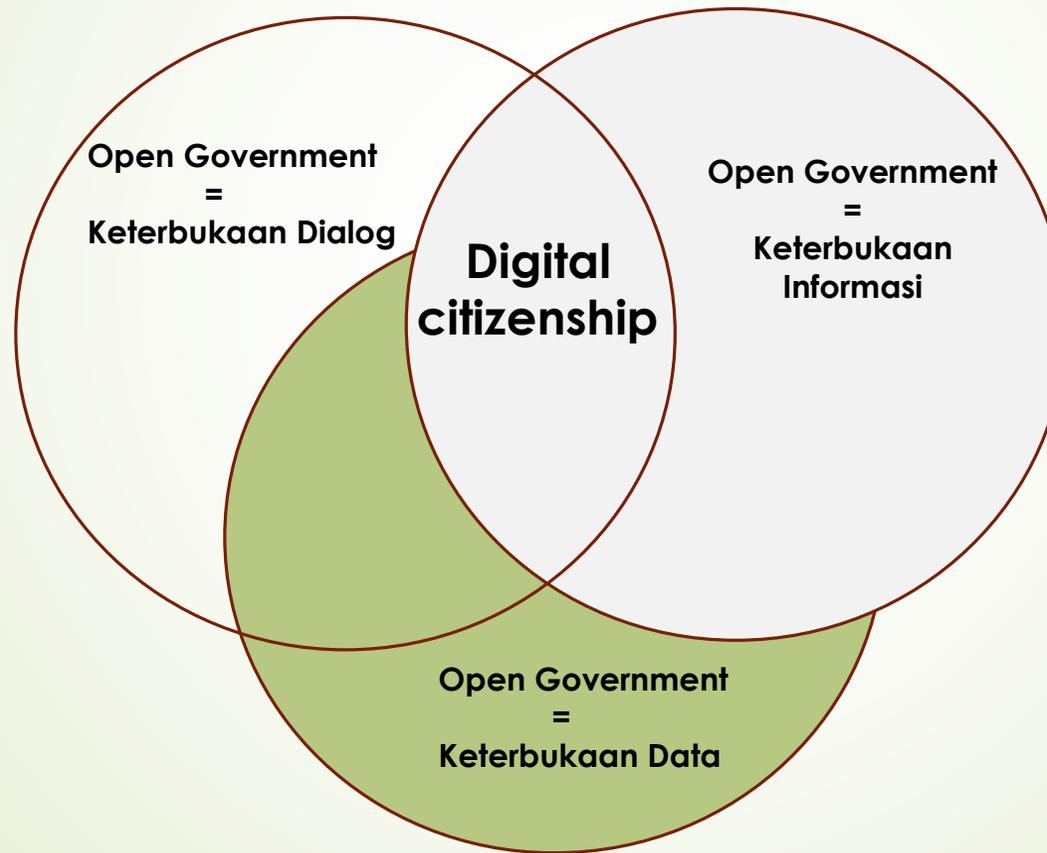
Medan, 29 Maret 2022

Memahami Perkembangan Konsep Open Government



SISTEM KETERBUKAAN PEMERINTAHAN

The OECD defines open government as “a culture of governance based on innovative and sustainable public policies and practices inspired by the principles of transparency, accountability, and participation that fosters democracy and inclusive growth.” (OECD 2016)



Data, pemberdayaan, ko-kreasi: memungkinkan warga negara untuk bebas berbicara, berserikat, dan berkumpul, memberdayakan warga untuk berpartisipasi, membentuk kebijakan dan layanan public, memantau dan mengawasi pemerintah.

The OECD Recommendation on Digital Government Strategies

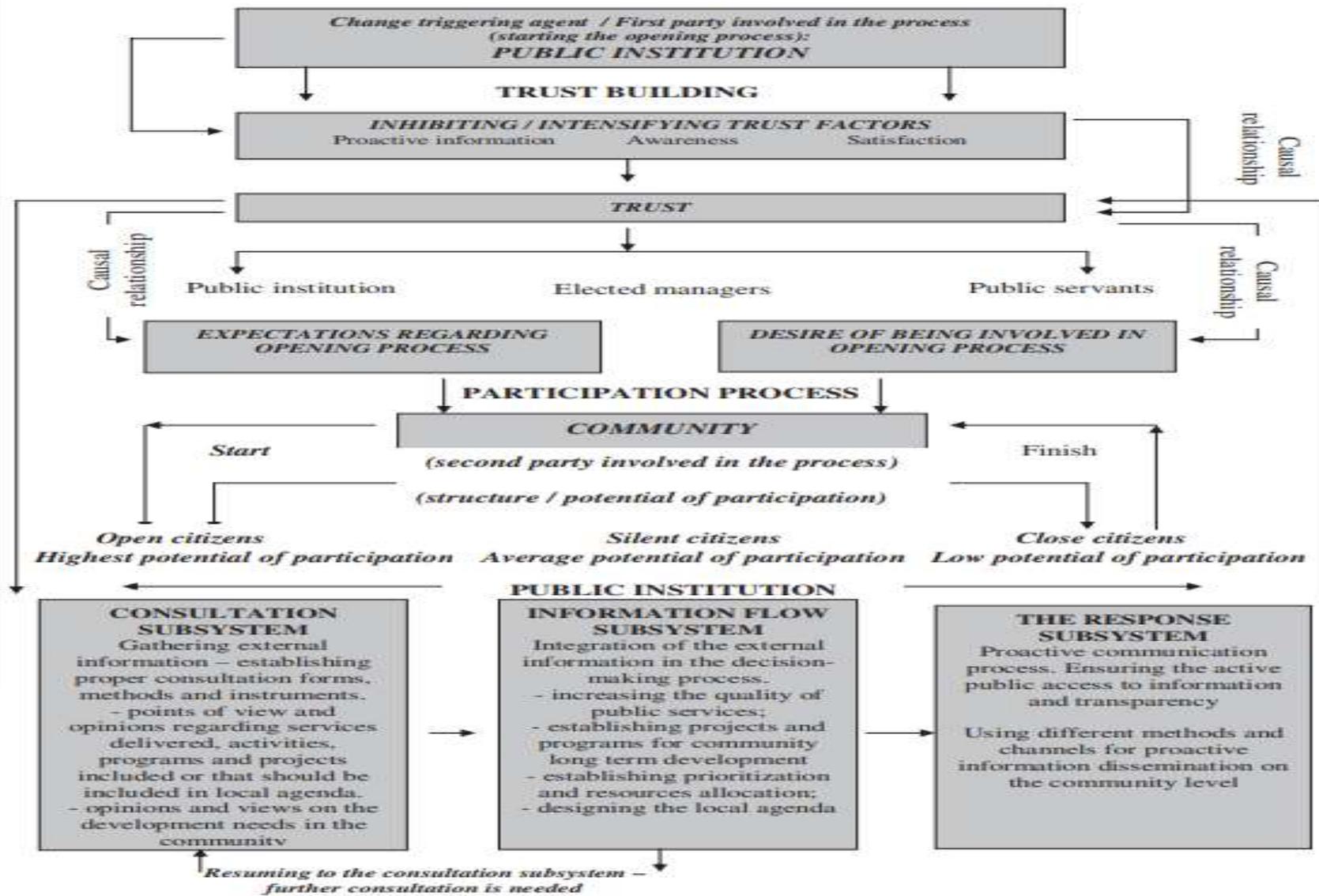


Source: OECD Recommendation on Digital Government Strategies

PENTINGNYA PARTISIPASI DALAM OG

- Meningkatkan rasa tanggung jawab dan pemahaman warga tentang isu-isu kompleks
- Meningkatkan Legitimasi. Pemahaman tentang prioritas dan nilai diantara warga dengan pemerintah yang mewujudkan kepemilikan antara institusi publik dan warga negara atas kebijakan dan keputusan yang dihasilkan.
- Mengembangkan pilihan kebijakan yang lebih terinformasi dan lebih konsensual
- Pemerintah dapat memanfaatkan kreativitas dan pengetahuan teknis warga negara
- Meningkatkan interaksi antara pemerintah dan warga negara dalam berbagi informasi dan tanggung jawab untuk keputusan politik,
- Meningkatkan kepercayaan dan penerimaan yang lebih baik dari kebijakan publik pemerintah,

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM OPEN GOVERNMENT: DEMOKRASI PARTISIPATIF



Ko-Kreasi:

- Produksi info/ pengetahuan
- Transfer info/ pengetahuan
- Penggunaan pengetahuan

DEMOKRASI PARTISIPATIF:

- Co-production
- Co-delivery
- Coevaluation

Mengapa Open Government?

- Kebijakan publik yang lebih inklusif dan demokratis
- Perbaiki kualitas pelayanan public melalui peningkatan efisiensi dan efektifitas manajemen data
- Infrastruktur data pemerintah yang lebih baik
- Tatakelola pemerintahan yang lebih baik melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan pemberdayaan
- Dapat mengubah seluruh persepsi layanan publik dari otoritas dan penyedia layanan menjadi arena kolaborasi dan pemberdayaan
- Pertumbuhan ekonomi melalui keterbaharuan produk, pelayanan, pendapatan, keuntungan dan penciptaan pekerjaan baru

Tantangan Open Government

Open government sebagai retorika

Rendahnya komitmen pejabat/administrator public dalam implementasi open government

Keterbatasan pengetahuan pejabat public tentang nilai tambah partisipasi masyarakat

Rendahnya ketertarikan masyarakat

Keterbatasan kapasitas NGO

ISSUES: WHAT NEXT?

- Open Government sebagai ko-kreasi nilai demokrasi partisipatif: Open Government akan sulit dicapai jika hanya semata berpatokan pada efisiensi dan mengabaikan prinsip transparansi, kesetaraan, proses ko-kreasi dan inovasi
- Pentingnya Etika OP: Perubahan/transformasi interaksi pemerintah-masyarakat-bisnis dapat mempertahankan kesenjangan lama dan menciptakan kesenjangan baru. Isu2 yang muncul: tantangan interaksi keamanan, privasi, kebebasan informasi, efisiensi, transparansi dan tatakelola pemerintahan
- Keseimbangan antara Administrasi birokratik dan demokrasi
- Ko-kreasi: ketidaksetaraan, hubungan kekuasaan, dan bentuk-bentuk pemerintahan
- Bagaimana OG mampu menyediakan platform bagi masyarakat dan memungkinkan masyarakat untuk bergerak?
- Bagaimana menjamin partisipasi dapat diakses, setara dan inklusif untuk berbagai golongan masyarakat yang berbeda?



TERIMA KASIH

